

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumenep

Oleh :

Ahmad Zahrudin, Hidayat Andyanto, S.H., M.Si, Sutrisni, S.H., M.H.

Penerapan PSBB di sejumlah wilayah belum optimal. Bahkan, cenderung belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seperti di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) khususnya di kabupaten Sumenep. Menurutnya, perlu ada ketegasan Gugus Tugas, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegakkan aturan yang ditetapkan agar masyarakat dapat menjalankan kebijakan penerapan PSBB secara konsekuen, sehingga peneliti mengangkat permasalahan Apa dasar pertimbangan hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

Tujuan penelitian ini dimana Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep serta Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis tentang penyimpangan penyaluran dana Bansos ini dibahas dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) agar dapat diketahui duduk persoalan yang sesungguhnya dan dikemukakan pendapat dalam bentuk saran tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak terkait.

Dasar Pertimbangan Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumenep berikut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta pengenaan sanksi untuk setiap orang yang tidak menggunakan masker di tempat umum salah satunya di atur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sanksi Administratif Teguran Lisan dan/atau Teguran Tertulis, Kerja Sosial, Denda administrative Setinggi-tingginya Rp. 250.000, Penyitaan KTP atau Kartu Identitas lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar.

ABSTRACT

Law Enforcement Against Large-Scale Social Restrictions Violators During the Covid-19 Pandemic In Sumenep Regency

By :

Ahmad Zahruddin, Hidayat Andyanto,S.H.,M.Si, Sutrisni,S.H.,M.H.

The implementation of PSBB in a number of areas has not been optimal. In fact, it tends to be ineffective in breaking the chain of the spread of Covid-19, such as in the Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) areas, especially in the Sumenep Regency. According to him, there needs to be firmness of the Task Force, the Police, and the Indonesian National Armed Forces (TNI) in enforcing the established rules so that the public can implement the PSBB policy consistently, so that researchers raise the issue of What is the legal basis for considering large-scale social restrictions during the Covid-19 pandemic in Indonesia? Sumenep Regency and What are the legal consequences for violations of Large-Scale Social Restrictions during the Covid-19 Pandemic in Sumenep Regency.

The purpose of this study is to study and analyze the legal considerations for Large-Scale Social Restrictions during the Covid-19 Pandemic in Sumenep Regency and to examine and analyze the legal consequences of violations of Large-Scale Social Restrictions during the Covid-19 Pandemic in Sumenep Regency.

This study uses a normative juridical research method with an analysis of deviations in the distribution of social assistance funds. This study is discussed with a statutory approach and a case approach so that the real problems can be identified and opinions are expressed in the form of suggestions for actions that can be taken by the community. related parties.

Basic Legal Considerations of Large-Scale Social Restrictions During the Covid-19 Pandemic In Sumenep Regency following Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Scaled Social Restrictions Large, Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions, East Java Governor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 and Sumenep Regent Regulation Number 61 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement Health protocols and the imposition of sanctions for everyone who does not use masks in public places are regulated in Sumenep Regent Regulation Number 61 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement Health Protocols Administrative sanctions Oral and/or written warnings, social work, administrative fines strative Up to Rp. 250,000, confiscation of ID cards or other identity cards within a certain period of time.

Keywords: *Law Enforcement, Large-Scale Social Restrictions Violator*

